



Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara, 1955-2022

The Development of Muhammadiyah in Southeast Aceh Regency, 1955-2022

Mirna Anggriani*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Solihah Titin Sumanti, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Abdi Mubarak Syam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Established in 1937, Muhammadiyah made its debut in Southeast Aceh through Minangkabau migrants, propagating its teachings and organization. Despite initial challenges, including misconceptions labeling Muhammadiyah as Wahabi or Salafi, it emerged as a Quran and Hadith-based movement. Utilizing historical research methods, this study explores Muhammadiyah's impact on Southeast Aceh, revealing rapid acceptance among the Alas people due to their existing religious understanding. Muhammadiyah significantly influenced the region, targeting social, educational, and religious spheres for renewal. Its presence led to the establishment of educational institutions and social development, resonating deeply with the community's needs. Muhammadiyah's role in Southeast Aceh exemplifies its broader mission to enrich Islamic practices and community welfare, underscoring its profound influence in the region's religious and social landscape. Through its multifaceted initiatives, Muhammadiyah continues to shape the socio-religious fabric of Southeast Aceh, embodying a dynamic force for positive change in the community.

ARTICLE HISTORY

Received 30/12/2023
Revised 11/01/2024
Accepted 18/01/2024
Published 19/02/2024

KEYWORDS

Muhammadiyah; Southeast Aceh; religious renewal; social development; historical research.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ mirnaanggriani48@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8675>

PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia adalah eksistensi organisasi massa Islam. Organisasi-organisasi ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan bangsa Indonesia bahkan sebelum negara ini merdeka pada tahun 1945. Salah satu yang menarik untuk diperbincangkan adalah Muhammadiyah, sebuah ormas Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, pusat kebudayaan Jawa. Muhammadiyah dianggap sebagai perwakilan kemajuan dalam kalangan umat Islam. Banyak tokoh dari Muhammadiyah terlibat dalam pembentukan negara, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Mas Mansyur, yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam merumuskan dasar negara sebelum kemerdekaan pada tahun 1945 (Ambarwati, 2018).

Kehadiran organisasi kemasyarakatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama. Hal ini seiring dengan munculnya kelompok-kelompok berkepentingan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya undang-undang yang mengatur aktivitas ormas, penting ditegaskan bahwa anggota ormas harus menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Era 1980-an ditandai dengan bangkitnya ormas sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Pada masa ini, eksistensi organisasi masyarakat berkembang pesat di seluruh Indonesia. Namun, beberapa ormas saat ini mulai mendapat kritik karena aktivitasnya cenderung menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi masyarakat serta landasannya, termasuk aturan main dan tujuan ormas itu sendiri (Budairi, 2002).

Kehadiran lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah pada masa itu merupakan alternatif bagi kalangan pribumi yang tidak memiliki akses ke pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sekolah Belanda pada masa itu bersifat sekuler, hanya mengajarkan mata pelajaran umum tanpa menyertakan pendidikan agama. Kondisi ini menjadi permasalahan tersendiri, sehingga Muhammadiyah menciptakan konsep pendidikan yang menggabungkan kedua aspek tersebut. Pendirian organisasi ini tidak terlepas dari berbagai persoalan keagamaan pada saat itu, terutama di Yogyakarta yang menjadi saksi mata bagi KH. Ahmad Dahlan sendiri. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari tanah Arab, seperti Wahabi dan Rasyid Ridha, yang merupakan murid dari Muhammad Abduh (Syam, [2004](#)).

Berangkat dari persoalan tersebut, lahirlah kesadaran dari KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan dan mengembangkan Muhammadiyah, terutama karena pemikiran reformis dari Mesir yang dipegang oleh Muhammad Abduh telah meresap dalam dirinya. Oleh karena itu, semangat pembaruan (*tajdid*) yang ingin mengembalikan ajaran Islam kepada akar-akarnya selalu menjadi fokus utama yang diusung oleh Muhammadiyah. Selain itu, salah satu gerakan penting yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menerapkan konsep dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan masyarakat Islam yang harmonis. Menurut Nashir, melalui pelaksanaan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuan utamanya, yaitu "terwujudnya masyarakat Islam yang sesungguhnya" (Nashir, [2014](#)).

Perkembangan Muhammadiyah dalam sejarahnya juga meluas hingga ke daerah bumi Serambi Makkah, yaitu Aceh. Keberadaan Muhammadiyah di Aceh tidak terlepas dari kehadiran para perantau dari Minangkabau, Sumatera Barat. Muhammadiyah di Aceh memiliki corak yang berbeda dengan di Jawa atau Minangkabau. Di sini, mereka tidak hanya aktif dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan, tetapi juga menjadi saluran aspirasi politik masyarakat Aceh. Tidak jarang Muhammadiyah Aceh menghadapi hambatan dari pemerintah kolonial akibat aktivitas politiknya. Model ini tercermin dari kondisi politik dinamis di Aceh pada waktu itu. Meskipun menghadapi tentangan dari pemerintah Belanda, Muhammadiyah tetap gigih menjalankan programnya, meskipun hanya sebagian kecil sekolah rakyat di Aceh yang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar (Waryanti et al., [2005](#)).

Organisasi Muhammadiyah di Aceh Tenggara telah ada sejak tahun 1930-an, jauh sebelum pembentukan kabupaten tersebut pada tahun 1974. Mereka telah memainkan peran penting dalam pengembangan Islam, pendirian institusi pendidikan, dan kegiatan sosial. Hubungan etnik Minangkabau di Aceh Tenggara sangat erat dengan organisasi ini. Meskipun ada perbedaan dalam praktik keagamaan, yang oleh sejarawan sering disebut sebagai modernis, namun dakwah yang mereka lakukan cukup diterima oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat Aceh Tenggara cenderung terbuka dan mampu mengakomodasi perbedaan dengan baik. Para pengelola Muhammadiyah yang berasal dari etnis Minangkabau juga memiliki kemampuan komunikasi dan adaptasi yang baik dengan masyarakat lokal di Aceh Tenggara.

Pemahaman agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam, semakin meluas. Sebagian ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreativitas umat Islam terkekang. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk menafsirkan atau memberikan pendapat tentang suatu masalah. Peran ulama Islam yang terlibat dalam berbagai organisasi masyarakat dalam perjuangan mencapai kemerdekaan tidak dapat diabaikan. Salah satu organisasi Islam yang berkembang adalah Muhammadiyah. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta.

Ahmad Dahlan, sebagaimana para pembaharu Islam lainnya, dengan karakteristik yang unik, memiliki cita-cita untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan memajukan kehidupan melalui tajdid (pembaruan) yang mencakup aspek-aspek tauhid (aqidah), ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam serta kehidupan umat Islam, dengan mengacu pada sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi yang *sahih*, serta membuka pintu *ijtihad*. Dahlan bermaksud membersihkan aqidah Islam dari segala bentuk syirik, menghilangkan praktik-praktik *bid'ah* dalam ibadah, menyingkirkan kepercayaan dari *khurafat* dalam muamalah, dan mengubah pemahaman tentang ajaran Islam dengan membebaskan umat Islam dari taklid untuk memberikan kebebasan dalam berijtihad.

Perintisan kehadiran Muhammadiyah di Aceh dimulai sejak tahun 1923 oleh S. Djaja Soekarta, mantan pengurus Muhammadiyah di Betawi, yang saat itu bekerja di perusahaan Aceh Tram. Pada tahun 1927, pengurus pusat Muhammadiyah aktif memberikan dukungan langsung bagi perkembangan organisasi di Aceh, sehingga Muhammadiyah mulai merambah ke berbagai wilayah di Aceh, termasuk Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Kuala Simpang, dan daerah-daerah lainnya. Sebagai Konsul pertama, Teuku Muhammad Hasan dari Glumpang Payong diangkat, yang kemudian digantikan oleh T. Tjut Hasan, anggota keluarga *Uleebalang Meuraxa* (Rusdi, [2007](#)).

Penyebaran paham Muhammadiyah di wilayah Aceh dilakukan melalui serangkaian kunjungan tablig dan kuliah di setiap cabang Muhammadiyah, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada masa pendudukan Jepang, salah satu mubalig Muhammadiyah yang juga menjabat sebagai ketua Hizbul Wathan Aceh, yakni Teuku Muhammad Idris Lhoong, mengadakan kunjungan dari Kutaraja hingga wilayah *Westkust van Aceh* sampai ke Singkil. Dampaknya, Muhammadiyah berkembang pesat di Aceh, mengungguli daerah-daerah lainnya di wilayah tersebut (Waryanti et al., [2005](#)).

Kajian sebelumnya telah mengungkap perkembangan Muhammadiyah di bagian lain Aceh. Misalnya, penelitian oleh Zalekha pada perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie dari tahun 1970 hingga saat ini, serta kontribusinya terhadap masyarakat setempat (Zalekha, [2017](#)). Penelitian tersebut menunjukkan kemajuan dan aktivitas Muhammadiyah di Kecamatan Blangpidie dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Selain itu, terdapat kajian tentang perkembangan Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017) oleh Hasmida. Penelitian ini menyoroti masuknya Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien pada tahun 1940, yang dibawa oleh Tengku Ibnu Hajar, seorang pendatang dari Meukek, Aceh Selatan. Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien berkembang pesat dalam bidang keagamaan, ekonomi, dan pendidikan, yang didorong oleh upaya bersama Muhammadiyah dan masyarakat setempat (Hasmida, [2017](#)).

Penelitian oleh Alfian tentang perkembangan Muhammadiyah di Banda Aceh (1923-1943) menjelaskan bahwa gagasan tentang Muhammadiyah sudah muncul di Aceh pada tahun 1923, yang awalnya diperkenalkan oleh seorang pegawai pegadaian Belanda asal Sunda, Djajasoeakarta. Namun, menurut catatan resmi organisasi Muhammadiyah, didirikan di Banda Aceh pada tahun 1927 (Alfian, [2014](#)). Selanjutnya, penelitian oleh Nofil Gusfira tentang Strategi dan Dinamika Muhammadiyah di Takengon menyoroti makna keberadaan Muhammadiyah di sana, yang telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Gayo. Namun, pengaruh modernisasi, politik, dan ekonomi juga menciptakan dinamika dalam perkembangan dan kehidupan masyarakat setempat (Gusfira, [2017](#)).

Meskipun pendekatan Muhammadiyah bervariasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya, Muhammadiyah sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, yang berakar pada ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Oleh

karena itu, Muhammadiyah memiliki identitas yang jelas: sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, dan gerakan yang berpegang pada ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Identitas ini mempengaruhi cakupan dan aktivitasnya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan kebutuhan manusia atau masyarakat (Syaifullah, [1997](#)). Sejauh yang diperlihatkan oleh sejumlah kegiatan di Aceh, Muhammadiyah menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki (Zain et al., [2017](#)).

Dengan latar belakang tersebut, peneliti berpendapat bahwa penting untuk mengkaji perkembangan Muhammadiyah di Aceh Tenggara (1955-2022). Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Muhammadiyah pertama kali memasuki Aceh Tenggara dan bagaimana organisasi ini berkembang di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang dihadapi. Menurut peneliti, kajian ini penting karena akan memberikan informasi dan penjelasan tentang proses masuk dan perkembangan Muhammadiyah di Aceh Tenggara selama periode 1955 hingga 2022. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk kajian-kajian selanjutnya tentang Muhammadiyah di Aceh Tenggara. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki proses, perkembangan, serta hambatan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi Muhammadiyah dalam menyebarkan dakwah di Aceh Tenggara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, sebuah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menghasilkan sintesis tertulis. Tahapan heuristik melibatkan pengumpulan data sumber sejarah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber sejarah dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan bentuk dan prioritas penggunaan. Data primer yang penulis gunakan berasal dari Organisasi Muhammadiyah di Aceh Tenggara serta wawancara dengan beberapa pengurusnya. Data sekunder diambil dari beberapa artikel yang membahas perkembangan Organisasi Muhammadiyah di cabang-cabang di Aceh. Verifikasi merupakan upaya penulis dalam memilah dan memilih sumber yang dipercaya, baik secara eksternal maupun internal, dari data yang terkumpul. Interpretasi melibatkan penafsiran penulis terhadap sumber sejarah yang telah dikumpulkan, guna memahami maksud dan tujuan di baliknya. Historiografi merupakan tahapan terakhir, di mana hasil penelitian disusun menjadi tulisan.

Peneliti juga menggunakan pendekatan keagamaan untuk menjelaskan religiositas masyarakat, berfokus pada tingkat konservatif dan ritual keagamaan, bahkan lebih terfokus pada bentuk tradisional suatu agama (Alauddin et al., [2023](#)). Penelitian ini melibatkan wawancara langsung dengan pelaksana peristiwa dan saksi mata terkait judul penelitian "Perkembangan Ormas Islam Muhammadiyah (1955-2022)".

Tabel 1. Nama Informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Bagindo Ali Akbar, SE | Ketua Pengurus Muhammadiyah Aceh Tenggara |
| 2 | Ustad. Ruli Pardian, MA | Wakil Sekretaris Pengurus Muhammadiyah Aceh Tenggara |
| 3 | Siti Warisah | Masyarakat Muhammadiyah Aceh Tenggara |

Teknik wawancara dapat dilakukan secara individual maupun kelompok (Suyitno, [2018](#)). Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak pengurus daerah Muhammadiyah kabupaten Aceh Tenggara untuk mengumpulkan data penelitian. Terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan selama proses penelitian, yang melibatkan pengumpulan data, pencatatan pola, penjelasan, sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan dibuat dengan cermat, terbuka, dan skeptis (Rijali, [2018](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Berdirinya Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Agustus 2022 mengungkapkan informasi dari wakil sekretaris pengurus Muhammadiyah bahwa pada masa lalu terdapat komunitas orang Minang yang bermigrasi ke Aceh Tenggara. Mereka pertama-tama mencari masjid, dan setelah beribadah, mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dahulu terdapat sebuah masjid wakaf yang pengurusnya rata-rata berasal dari orang Minangkabau yang mayoritas merupakan anggota Muhammadiyah. Oleh karena itu, masjid ini diberi nama Masjid At-Taqwa, sesuai dengan kebiasaan di kalangan Muhammadiyah yang memberikan nama Taqwa pada setiap masjid yang mereka bangun. Ketika cabang Muhammadiyah dari Aceh Tengah didirikan, orang-orang Minangkabau juga membentuk cabang Muhammadiyah di Aceh Tenggara. Indikasi dari orang-orang terdahulu menunjukkan bahwa sekitar tahun 1955, Muhammadiyah di Aceh Tenggara sudah terbentuk, dengan Nyak Obor sebagai ketua pertamanya (wawancara dengan Ustadz Ruli).

Ketua pengurus Muhammadiyah Aceh Tenggara menegaskan bahwa pada masa itu, pengenalan Muhammadiyah kepada orang non-Minangkabau dilakukan secara bertahap. Saat ini, tidak hanya orang Minangkabau yang menjadi pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara, asalkan memiliki komitmen untuk memajukan Muhammadiyah, siapa pun boleh bergabung. Misalnya, Nyak Obor sebagai ketua pertama (Minangkabau), Abdurrahman (Alas), dan Arifin dari (Gayo). Dalam hal kepemimpinan, tidak ada pertimbangan suku. Cabang Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara kini memiliki empat cabang, yaitu Cabang Lawe Alas, Cabang Simpang Semadam, Cabang Lawe Sigala, dan Cabang Kutacane, yang paling aktif adalah Cabang Kutacane yang berlokasi di pusat kota. Hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah berjalan baik dan Muhammadiyah dianggap sebagai mitra pemerintah.

Selain itu, perkembangan Muhammadiyah di Aceh juga menunjukkan adanya kantong-kantong di mana ajaran Muhammadiyah hidup dengan baik dan stabil, yang disebut sebagai "daerah modal". Di antara daerah-daerah ini adalah Merduati, Sukaramai, Keudah, dan Bandar Baru atau Lampriet di Banda Aceh; Lhong Blangme di Aceh Besar; Meureudu di Pidie; Bireuen (Aceh Utara); Simpang (Aceh Timur); Jeuram (Aceh Barat); dan Blang Pidie (Aceh Selatan) atau Aceh Kota Kutacane (Aceh Tenggara). Selanjutnya, Muhammadiyah terus berkembang secara menyeluruh dan melaksanakan berbagai kegiatan amal usaha (Muhammadiyah, n.d.).

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara

Berdirinya cabang Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara pertama kali tercatat pada tahun 1955, di mana kelompok orang Minangkabau melakukan migrasi ke wilayah tersebut dari Takengon menuju Blangkejeren, dan kemudian ke Aceh Tenggara. Bahkan sebelum masa kemerdekaan, sejak tahun 1800, orang Minangkabau sudah tinggal di Aceh Tenggara. Motivasi untuk merantau dan persiapan sebelum berangkat merupakan bagian dari budaya mereka, disertai dengan tuntutan kehidupan. Sebelum berangkat, mereka diberi nasihat, pengetahuan, bahkan diajarkan seni bela diri. Persiapan tersebut bertujuan untuk melatih kemampuan adaptasi mereka di lingkungan baru, sebagaimana pepatah yang mengatakan, "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Merantau dianggap sebagai kebanggaan, meskipun pada akhirnya mereka harus kembali ke tanah kelahiran. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya pengembangan dakwah Islam, termasuk pengembangan organisasi Muhammadiyah.

Migrasi orang Minangkabau ke Aceh Tenggara dengan membawa Muhammadiyah tidaklah dilakukan untuk kepentingan bisnis atau mencari penghidupan di dalam Muhammadiyah. Mayoritas dari mereka yang bergabung dengan Muhammadiyah telah memiliki usaha sendiri di luar organisasi.

Oleh karena itu, mereka tetap mempraktikkan prinsip pendiri Muhammadiyah, yaitu "Hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di dalamnya", dengan menjadikan kegiatan dakwah dan sosial sebagai fokus utama. Kontribusi keuangan dari anggota atau donatur digunakan secara sosial dan diatur dengan ketat untuk kepentingan organisasi. Para pengurus Muhammadiyah sangat menekankan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan organisasi, yang secara luas meningkatkan kepercayaan jamaah (Murni, [2002](#)).

Setelah didirikannya cabang Muhammadiyah dari Aceh Tengah, orang-orang Minangkabau juga membentuk cabang Muhammadiyah di Kutacane, Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa sekitar tahun 1955, Muhammadiyah telah hadir di Aceh Tenggara. Ini tidak terlepas dari aktivitas ekonomi mereka yang bergantung pada perdagangan dengan masyarakat lokal, sementara mereka tidak aktif dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, bagi mereka yang berasal dari luar daerah, bekerja sebagai petani di perantauan mungkin tidaklah sebaik menjadi bagian dari migrasi merantau.

Selama ini, sebagian besar orang hanya menyadari pengaruh Muhammadiyah di Aceh sebatas pada bidang keagamaan, padahal organisasi ini memiliki dampak yang meluas, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk paham keagamaan, pendidikan, dan sosial, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan masyarakat Aceh Tenggara. Sebagai salah satu gerakan Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang sepele. Kelahiran Muhammadiyah harus diakui sebagai respons konkret umat Islam terhadap berbagai masalah sosial, pendidikan, keagamaan, bahkan politik yang melingkupi bangsa Indonesia.

Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Agustus 2022, terkait perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah di wilayah tersebut yang telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, keagamaan, dan sosial. Keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara tercermin dalam pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah, serta Tempat Pembelajaran Quran (TPQ). Hasil wawancara peneliti dengan Siti Warisah, seorang anggota masyarakat Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah telah memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat Aceh Tenggara, terutama dalam mengajarkan praktik ibadah yang benar (wawancara dengan Siti Warisah).

Muhammadiyah di Aceh Tenggara telah membentuk empat cabang, yaitu cabang Kutacane, cabang Lawe Alas, cabang Simpang Semadam, dan cabang Lawe Sigala, dengan cabang Kutacane menjadi yang paling aktif hingga saat ini.

Tabel 2. Nama Pimpinan Muhammadiyah kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|----------------------|------------------|
| 1 | H. Bagindo Ali Akbar | Ketua |
| 2 | Drs H. Buchari Ahmad | Wakil Ketua |
| 3 | M. Asri Piliang | Wakil Ketua |
| 4 | Drs. Muliadi Imami | Wakil Ketua |
| 5 | Masri Amin | Sekretaris |
| 6 | H. Ruly Pardian | Wakil Sekretaris |
| 7 | Irwan Salamuddin | Wakil Sekretaris |
| 8 | Endang Gunaidi | Bendahara |

Hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah berjalan harmonis dan merupakan mitra penting pemerintah, terutama terlihat dalam lembaga FKUB, Majelis Adat Aceh (MAA), dan MPU. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban kerja pemerintah, khususnya dalam bidang sosial, seperti yang terlihat dari aktivitas Lazismu yang semakin

intens, seperti program bedah rumah dan penanganan korban banjir. Pengurus Muhammadiyah Aceh Tenggara tidak pernah melakukan intervensi dalam pemilihan kepemimpinan, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, menegaskan independensi organisasi tersebut. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada anggota dan kader Muhammadiyah.

Muhammadiyah Aceh Tenggara menjalin hubungan baik dengan Muhammadiyah Sumatera Utara, seperti yang terlihat dari keikutsertaan *mubaligh* dari Sumatera Utara dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Aceh Tenggara. Contohnya, baru-baru ini, acara pelatihan atau kaderisasi diadakan dengan mengundang pembicara dari Muhammadiyah Sumatera Utara. Setiap kegiatan Muhammadiyah di Aceh Tenggara selalu terbuka untuk melibatkan organisasi masyarakat lainnya.

Program kerja Muhammadiyah di Aceh Tenggara mencakup dua kategori utama. Pertama, pengembangan organisasi terkait dengan tertib administrasi, yang meliputi:

- 1) Pemasangan atau perbaikan papan nama organisasi Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah di tingkat Daerah dan Cabang.
- 2) Pelaksanaan tertib administrasi sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah.
- 3) Penataan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
- 4) Pembuatan situs web dan surel Muhammadiyah untuk mempermudah komunikasi dan informasi organisasi.
- 5) Pembentukan dan optimalisasi kantor pusat bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan organisasi tingkat Daerah lainnya.
- 6) Pengembangan dan pemberdayaan Cabang dan Ranting Muhammadiyah.
- 7) Pembuatan database Muhammadiyah di semua tingkatan.
- 8) Penyebaran AD/ART Muhammadiyah ke semua Cabang.
- 9) Pelaksanaan pelatihan administrasi.
- 10) Penyusunan laporan secara periodik oleh setiap Cabang.

Kedua, konsolidasi organisasi Muhammadiyah di Aceh Tenggara, yang mencakup:

- 1) Pendanaan kegiatan organisasi Muhammadiyah sesuai dengan tingkatannya masing-masing (pertemuan, diskusi, seminar, lokakarya, dan proyek amal bersama).
- 2) Perayaan bersama Peringatan Hari Besar Islam dengan organisasi masyarakat setempat.
- 3) Kunjungan ke Cabang setidaknya 3 kali dalam satu periode kepemimpinan.
- 4) Optimalisasi peran masjid atau balai pendidikan sebagai basis aktivitas Muhammadiyah (pengajian, pengembangan Diniyah Awaliyah, dan kegiatan lain yang bermanfaat).

Muhammadiyah Aceh Tenggara menunjukkan komitmennya sebagai gerakan Islam yang konsisten dan memiliki semangat yang tinggi dalam mengamalkan ajaran Islam. Melalui kegiatan seperti pengajian dan salat berjamaah, Muhammadiyah mendorong semangat kebersamaan yang tinggi, yang menjadi dasar pembentukan kesalehan dan ketakwaan dalam mengelola organisasi. Pimpinan dan anggota Muhammadiyah diharapkan aktif dalam mengikuti dan menyelenggarakan kajian keislaman, memperhatikan masjid, meningkatkan ibadah sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah, serta melakukan amal-amal kebajikan lainnya.

Hambatan dan Peluang dalam Penyebaran Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa penyebaran Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara menghadapi berbagai hambatan dan peluang. Salah satu hambatan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara ulama, yang berdampak negatif pada dakwah Muhammadiyah. Selain itu, keaktifan anggota juga menjadi kendala, terutama karena mayoritas penggerak Muhammadiyah

adalah pedagang, yang membuat komunikasi menjadi sulit. Di sisi lain, jumlah pimpinan Muhammadiyah yang terbatas juga menjadi kendala dalam pengembangan organisasi.

Namun, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Muhammadiyah untuk memperluas dakwahnya, terutama dalam bidang pendidikan. Masyarakat Aceh Tenggara umumnya menerima baik Muhammadiyah, terutama dalam hal pendidikan dan keagamaan, karena pendekatan Muhammadiyah yang tidak memaksa atau menekan. Respons positif masyarakat Aceh Tenggara terhadap Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial.

Tantangan dakwah yang dihadapi oleh Muhammadiyah di Aceh juga terkait dengan persepsi masyarakat. Pertama, adanya ketidaknyamanan terhadap Muhammadiyah, yang muncul karena kesalahpahaman tanpa klarifikasi, dan seringkali diwarnai dengan klaim bahwa Muhammadiyah sesat. Kedua, dalam berdakwah, Muhammadiyah mengutamakan ajaran Alquran dan Sunnah, namun sering kali menabrak tradisi yang telah mapan di masyarakat. Muhammadiyah menekankan pentingnya mengamalkan ajaran Islam berdasarkan ilmu, bukan hanya karena mengikuti tradisi yang sudah ada (Zain et al., 2017).

SIMPULAN

Organisasi Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara didirikan pada tahun 1955 oleh para pendatang dari etnis Minangkabau yang berdagang dan secara bersamaan memperluas dakwah Islam dengan mendirikan cabang Muhammadiyah. Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Aceh Tenggara mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan keagamaan. Program amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Aceh Tenggara, khususnya dalam sektor pendidikan, seperti Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah, Tempat Pendidikan Quran Nasiatul Aisyiah, dan Taman Kanak-Kanak Muhammadiyah. Dalam konteks Aceh Tenggara, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan Islam, pendirian institusi pendidikan, dan kemajuan sosial. Peran Muhammadiyah ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, terutama karena organisasi ini secara aktif menanggapi kebutuhan dan aspirasi mereka. Muhammadiyah di Aceh Tenggara telah menargetkan tiga aspek utama untuk diperbarui, yaitu aspek sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan pemahaman keagamaan.

REFERENSI

- Alauddin, A., Fathma, A., Afida, L., & Helwa, F. (2023). Strategi Berkelanjutan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Komunitas Lokal: Studi Kasus Kabupaten Magelang. *Community*, 9(1), 1–15.
- Alfian. (2014). *Perkembangan Muhammadiyah di Banda Aceh (1923-1943)*. Universitas Sumatera Utara.
- Ambarwati, A. (2018). Perilaku dan Teori Organisasi. In Amirullah (Ed.), *Media Nusa Creative* (Issue April). Media Nusantara Creative. <https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03558.x>
- Budairi, A. (2002). *Eksistensi Organisasi Masyarakat dan Searah Perkembangannya di Indonesia*. Gramedia.
- Gusfira, N. (2017). Strategi Dan Dinamika Muhammadiyah Di Takengon. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 16–29.
- Hasmida. (2017). *Perkembangan Muhammadiyah di Gampong Kuta Bak Drien Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2009-2017)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammadiyah, P. W. (n.d.). *Sekilas Sejarah Muhammadiyah Aceh*. <http://aceh.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>
- Murni, D. (2002). *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*. INIS.
- Nashir, H. (2014). *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (I. Nasri, Ed.; Edisi ke E). Suara Muhammadiyah.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*. 17(33), 81–95.
- Rusdi, S. (2007). *Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional di Aceh Awal Abad XX*. Badan Perpustakaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. Tanzeh, Ed.; Cetakan 1). Akademi Pustaka.

Syaifullah. (1997). *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Grafiti.

Syam, F. (2004). *Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik* (Cetakan pertama). Gunung Agung.

Waryanti, S., Seno, & Indriani. (2005). *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Aceh* (R. Sufi & A. Nur, Eds.; Cetakan 1). Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Zain, A., Maimun, & Fuadi, M. (2017). *Internalisasi Nilai-Nilai Modernitas*. 1(1), 17–42.

Zalekha. (2017). *Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie Tahun 1970-sekarang*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.